

BAB I

PENDAHULUAN

A. Alasan pemilihan judul.

Gelombang ketiga demokrasi pada abad 20an ini telah melanda seluruh penjuru dunia. Negara-negara di dunia berlomba-lomba untuk menerapkan prinsip demokrasi di negaranya. Gelombang demokrasi ini telah melanda sebagian besar Asia, Eropa, dan tak terkecuali Timur Tengah.

Wilayah Timur Tengah yang selama ini didominasi dengan sistem pemerintahan *monarchy*, mulai mengalami pergeseran. Beberapa negara di Timur Tengah sedang berusaha membangun proses demokratisasi. Salah satunya adalah Palestina, Palestina yang saat ini sedang mengalami krisis politik dan kedaulatan, berusaha menerapkan prinsip demokrasi. Hal ini dibuktikan dengan, pada bulan Januari lalu Palestina sukses melaksanakan pemilihan umum, dan hasilnya partai Hamas yang baru pertama kali mengikuti pemilihan umum keluar sebagai pemenangnya.

Kemenangan Hamas di pemilu Palestina ini mengundang reaksi yang beragam dari dunia internasional, tak terkecuali dari Amerika Serikat. Amerika Serikat yang selama ini selalu menjunjung tinggi penegakan hak asasi manusia dan demokrasi dalam melakukan politik luar negerinya, mengeluarkan pernyataan bahwa Amerika tidak akan melakukan hubungan dengan Palestina, sampai Hamas yang sekarang menguasai pemerintahan Palestina bersedia menurunkan senjata dan mengakui Israel sebagai sebuah negara yahudi di tanah Palestina. Bahkan

Amerika Serikat mengancam akan melakukan penghentian pengiriman bantuan ke Palestina, jika Hamas tidak mengikuti kemauan Amerika Serikat

Sikap Amerika yang bertentangan dengan segala fakta bahwa Amerika selalu mendukung proses demokratisasi di dunia ini, menjadikan penulis merasa tertarik untuk mengkaji masalah tersebut guna diangkat sebagai judul skripsi, yaitu : Sikap Amerika Serikat Terhadap Kemenangan Hamas pada Pemilu 2006 di Palestina.

B. Tujuan penulisan

Dalam sebuah penulisan karya ilmiah terdapat berbagai tujuan baik secara umum maupun secara khusus. Dalam penulisan skripsi ini secara umum lebih ditujukan untuk mengetahui penyebab Amerika Serikat menolak kepemimpinan Hamas di Palestina.

Secara khusus, penulisan ini sebagai salah satu syarat meraih gelar sarjana di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

C. Latar belakang masalah

Amerika Serikat adalah sebuah negara yang sering membanggakan dirinya sebagai "*Champion Of Democracy*" (juara demokrasi) dan "*The Guardian Of Democracy*" (penjaga demokrasi) dengan tradisi demokrasi yang kokoh sejak di proklamirkannya deklarasi kemerdekaan pada 4 Juli 1776 hingga kini.

Amerika Serikat senantiasa mendengungkan tekadnya untuk menegakkan pelaksanaan demokrasi di seluruh dunia. Tekad tersebut semakin dipertegas dengan dikeluarkannya Doktrin Carter (1980), yang berusaha meningkatkan masalah penegakkan hak asasi manusia dalam kebijakan luar negeri Amerika

Serikat terhadap negara lain. Amerika Serikat bahkan tidak segan-segan menjatuhkan sanksi politik, ekonomi, maupun militer kepada negara-negara yang dianggapnya tidak menghormati hak asasi manusia.

Perkembangan sistem demokrasi Amerika Serikat pada hakekatnya didasarkan pada individualisme. Demokrasi barat yang amat kuat berangkat dari pemikiran bagaimana setiap individu warga negara mendapatkan kebebasan dan perlindungan hukum, dan demokrasi yang menitik beratkan kepada "*Life, Liberty, Prosperity*". Kemudian masalah demokrasi dan hak asasi manusia ini semakin menguat sesudah perang dunia I, dan diikuti dengan pembentukan Liga Bangsa-Bangsa.

Masa sebelum pecahnya Perang Dunia II tahun 1918, Presiden Amerika Serikat Woodrow Wilson menyampaikan Empat Belas pokok Pidato (*Fourteen Point Speech*), yang menekankan perlunya penegakan demokrasi dan hak asasi manusia. Perlunya penekanan hak asasi manusia pada konteks global yang termanifestasi dalam kebijakan Amerika Serikat Serikat, sesungguhnya merupakan kelanjutan dari sejarah panjang tradisi yang telah dikembangkannya.¹

Pada masa pecahnya Perang Dunia II tahun 1939, upaya perlindungan Hak Asasi Manusia dan penegakan demokrasi di tingkat internasional mendapatkan perhatian yang amat serius. Sehingga pada tahun 1940, Presiden AS Franklin D. Roosevelt merasa perlu untuk melepas status netralnya, dan segera bergabung dengan sekutu untuk membantu Inggris dan negara Eropa lainnya dari ekspansi yang dilakukan pemerintah diktator Nazi Jerman.

¹ Jatmika, Sidik, *AS Penghambat Demokrasi : Membongkar Standar Ganda Amerika Serikat*, Yogyakarta, Bigraf 2000, hal. 3

Sedangkan pada era Perang Dingin, kebijakan Amerika Serikat, masih berkaitan dengan penegakan hak asasi manusia dan demokrasi. Hal ini dipertegas dengan adanya Doktrin Pembendungan (*Containment Doctrine*), dan Doktrin Penangkisan (*Deterrence Doctrine*), untuk membendung pengaruh komunisme keseluruh dunia.

Runtuhnya Imperium Uni Soviet pada awal 1990an, telah menjadi tanda berakhirnya Perang Dingin. Perubahan pola politik Internasional dari Bipolar menjadi Uni polar memberikan Amerika Serikat kekuatan yang terlalu besar. Dengan berbekal misi perdamaian dan penegakan demokrasi, Amerika Serikat pada masa ini terlihat telah banyak membantu proses demokratisasi di berbagai negara di dunia ini. Dukungan Amerika Serikat terhadap proses demokratisasi di dunia bahkan tertuang pada dasar dasar tujuan politik luar negeri Amerika Serikat, yang berbunyi "AS mendukung demokratisasi dan HAM karena sejalan dengan ide-ide AS dan merupakan kepentingan AS".

Akan tetapi reaksi Amerika Serikat terhadap hasil pemilu yang lalu di Palestina bertentangan dengan semua fakta bahwa Amerika Serikat mendukung proses demokratisasi di dunia. Pada tanggal 25 Januari lalu, Palestina telah berhasil melaksanakan pemilu untuk memilih anggota parlemen. Pemilu ini, merupakan yang kedua kalinya diadakan di Palestina, setelah pemilu perdana di tahun 1996. Dalam putaran kedua ini Pemerintahan Otoritas Palestina menyediakan 132 kursi di Parlemen, lebih banyak dari pemilu sebelumnya yang hanya berjumlah 88 kursi

Hamas yang baru pertama kali ini terjun ke dalam pemilu berhasil keluar sebagai pemenang. Hamas dikenal oleh para pemilihnya sebagai kelompok yang aktif dalam isu sosial dan menolak isu korupsi menjadi alasan utama rakyat Palestina lebih memilih partai Hamas ketimbang Faksi Fatah.

Kemenangan Hamas berbeda dengan perkiraan sebelumnya. Berdasarkan perhitungan secara cepat oleh Universitas Bir Zeit, Fatah justru unggul dengan 46,4 persen suara. Adapun Hamas disebutkan hanya meraih 39,8 persen. Hamas menyapu seluruh kursi di parlemen, Fatah yang selama bertahun-tahun mengendalikan Palestina, hanya mampu meraih kemenangan di dua distrik, Qalqiliya dan Jericho. Sementara distrik terbesar Kota Gaza dan Hebron disapu bersih kelompok Hamas². Hamas yang baru pertama kalinya mengikuti pemilu, berhasil meraup suara mayoritas dengan mengantongi 57,6 % suara atau 76 kursi di parlemen. Fatah harus puas diposisi kedua dengan 43 kursi atau 32,6 %. Sisa 13 kursi atau 9,8 % ditempati oleh faksi-faksi kecil³.

Kemenangan partai Hamas pada pemilu kali ini mengundang reaksi beragam dari dunia internasional, tak terkecuali dari AS sang bapak demokrasi. AS yang selama ini selalu mendukung proses demokratisasi di berbagai negara, menolak untuk bekerjasama dengan partai Hamas. Palestina. Presiden George Walker Bush menyatakan, Amerika tidak bersedia berurusan dengan Hamas sebelum kelompok itu menyatakan tidak menyerang Israel.⁴

² *Newsticker, metro tv*, 26 januari 2006

³ *Ibid*, 28 Januari 2006

⁴ <http://www.kompas.com/kompas-cetak/0608/02/opini/2853735.htm>

Pernyataan Amerika Serikat tersebut tentu sangat bertolak belakang dengan dukungan AS terhadap proses demokratisasi, padahal pemilu di Palestina berlangsung sesuai dengan syarat demokrasi.

Dari segala pernyataan AS mengenai masalah demokratisasi di timur tengah, kemenangan kelompok Hamas di bilik suara warga Palestina merupakan hasil paling sulit yang pernah diterima AS. Amerika Serikat sudah mengisyaratkan, apa yang mungkin bisa dilakukan. Pembicaraan bisa saja dilakukan dengan pemerintah Palestina, tapi tanpa keikutsertaan anggota Hamas.

Dalam sebuah pernyataan, Condoleeza Rice menuntut Hamas, yang melakukan aksi bom bunuh diri terhadap Israel, meninggalkan aksi kekerasan, setuju hak hidup negara Yahudi itu, dan melucuti senjata⁵. Akan tetapi para pemimpin kelompok Hamas menolak untuk mengakhiri perlawanannya dengan Israel. Salah satu pemimpin Hamas, Khalid Mishaal menegaskan bahwa kelompoknya menolak seruan Barat untuk melucuti senjata mereka. "Selama kami masih dijajah, perlawanan adalah hak kami," kata Mishaal kepada para wartawan.⁶

Melihat adanya penolakan atas ajakan Amerika Serikat untuk menurunkan senjata dari para pemimpin Hamas Amerika Serikat lalu mengeluarkan ancaman akan menjatuhkan embargo ekonomi ke Palestina apa bila Hamas tidak mengakui Israel⁷. Sesaat sebelum Hamas membentuk pemerintah Palestina yang baru, sejumlah anggota Kongres Amerika dari Partai Demokrat dan Partai Republik mengajukan rancangan undang yang menghentikan

⁵ <http://www.gatra.com/artikel.php?id=91789>

⁶ *Kompas*, 29 januari 2006

⁷ <http://www.infopalestina.com/viewall.asp?id=8198>

bantuan untuk Palestina⁸. Hal ini tentu saja akan sangat merugikan Palestina karena saat ini Palestina sedang mengalami krisis ekonomi di negaranya dan sangat membutuhkan bantuan dana dari negara lain. Akan tetapi adanya fakta bahwa Amerika Serikat bukanlah salah satu dari negara penyumbang terbesar untuk Palestina membuat Hamas tidak mengindahkan ancaman embargo ekonomi yang dikeluarkan oleh Amerika Serikat. Oleh karena itu, konggres Amerika Serikat lalu membuat sebuah undang undang yang berisi mengenai penghentian bantuan dana dari Amerika Serikat ke Palestina.

Upaya AS yang lainnya dalam menolak kepemimpinan Hamas di Palestina tidak berakhir begitu saja, AS lalu berusaha mempengaruhi beberapa negara di Timur Tengah untuk sepakat dengan Amerika Serikat menolak kemenangan Hamas tersebut. AS melalui berbagai perwakilannya mengadakan kunjungan ke beberapa negara di timur tengah seperti ke Arab Saudi, Afghanistan, dan Pakistan demi mencari dukungan dalam menolak kepemimpinan Hamas tersebut. Dan Amerika Serikat bekerjasama dengan Israel dan Inggris untuk melakukan boikot terhadap kemenangan Hamas di Palestina tersebut.

D. Pokok Permasalahan :

Mengapa Amerika Serikat sebagai negara yang selalu berikrar untuk menjunjung tinggi demokrasi justru menolak kemenangan Hamas pada pemilu 2006 di Palestina?

⁸ <http://www.infopalestina.com/lihatberita.asp?id=8164>

E. Kerangka Teoritik :

1. Konsep Politik Luar Negeri

Politik luar negeri menurut Jack C. Plano dan Roy Olton adalah sebagai berikut⁹ :

“Foreign policy is a strategy or planned course of action developed by the decision makers of a state vis a vis other states or international entities aimed at achieving specific goals defined in terms of national interest”

Politik luar negeri sebagai salah satu sarana untuk melakukan ekspansi teoritik yang komprehensif dalam memahami perilaku politik AS. Bagaimanapun luas penelaahan terhadap perilaku politik luar negeri Amerika Serikat di Palestina, tetap pada batasan bahwa politik luar negeri merupakan sebuah tindakan yang terencana dan sudah diperhitungkan secara maksimal tentang untung ruginya serta baik buruknya.

2. Teori Pembuatan Kebijakan Luar Negeri (William D. Choplin)

Menurut William D. Choplin dalam menentukan kebijakan politik luar negeri di pengaruhi oleh tiga variabel yaitu ¹⁰:

a. Kondisi Politik Dalam Negeri (*Domestic Politics*)

termasuk di dalamnya faktor budaya yang mendasari tingkah laku politik aktornya dalam pengambilan keputusan.

⁹ Plano, Jack C. dan Olton, Roy, *The International Relation Dictionary*, Roy Rinehart, Winston Inc., Western Michigan University, New York, 1973, hal 172.

¹⁰ Choplin, William D., *Introduction In International Politics, A Theoretical Overview* (terjemahan M. Marbun), CV Sinar Baru, Bandung, 1992 hal 30

b. Kemampuan Ekonomi Dan Militer (*Economic Military Capability*)

Termasuk didalamnya faktor geografi yang selalu menjadi pertimbangan utama dalam pertahanan dan keamanan serta hubungan negara tersebut dalam perdagangan dan keuangan.

b. Konteks Internasional (*International Context*)

Kondisi – kondisi internasional pada saat itu termasuk negara yang berbatasan dengan satu negara akan mendorong tindakan – tindakan luar negeri tersebut

Ilustrasi 1.1
Tentang Pembuatan Kebijakan Luar Negeri
Menurut William D. Choplin

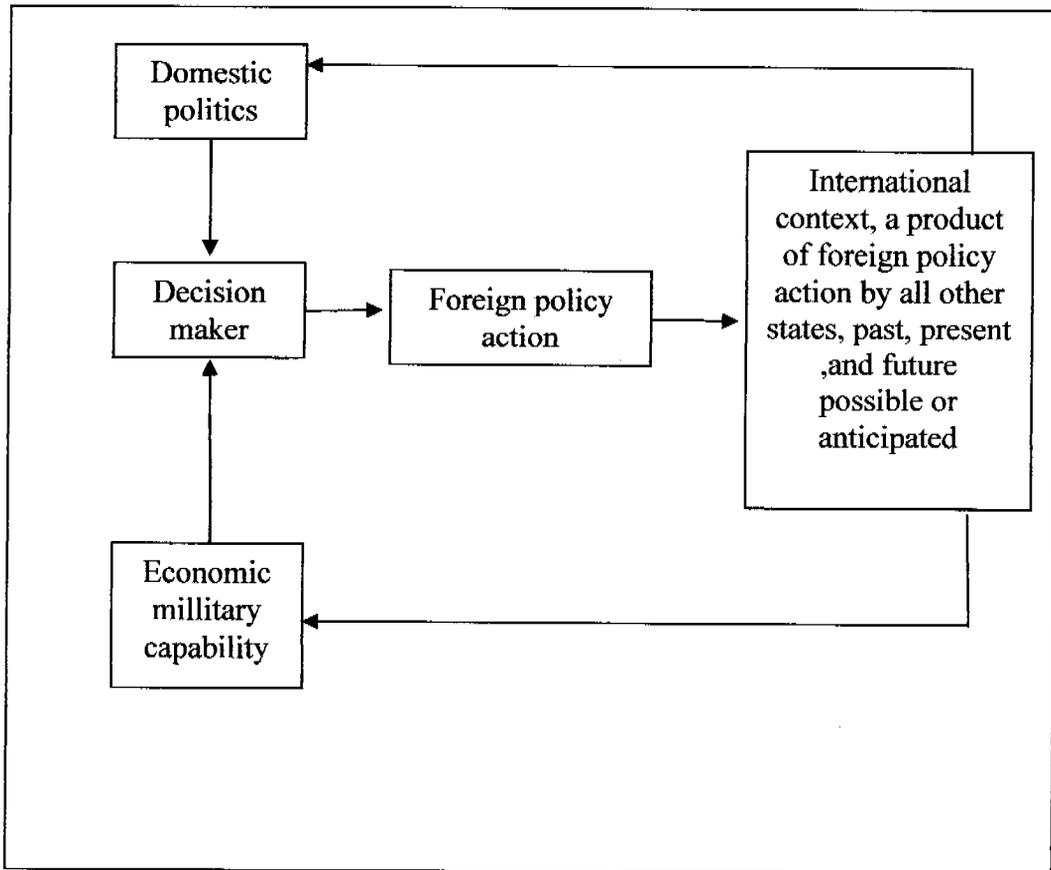
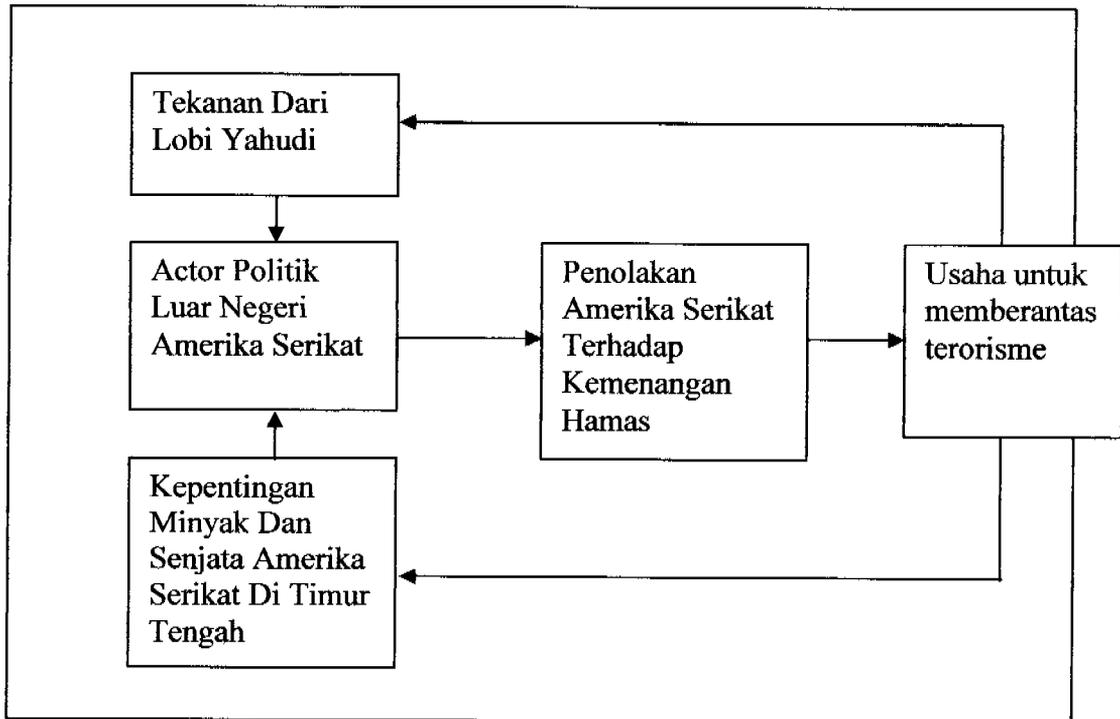


Diagram tersebut menjelaskan sebuah keputusan luar negeri dipengaruhi oleh kondisi dalam negeri (politik, ekonomi, dan militer), dan konteks internasional. Pada skema di atas menjelaskan interaksi variabel sehingga menghasilkan tindakan politik luar negeri suatu negara.

Ilustrasi 1.2

Aplikasi Teori William D. Choplin Terhadap Pokok Permasalahan



a. Politik dalam negeri Amerika Serikat

Kerangka konseptual untuk politik dalam negeri Amerika Serikat berfokus pada hubungan antara para pengambil keputusan politik luar negeri dan para aktor dalam negeri yang berupaya mempengaruhi politik luar negeri Amerika Serikat. Hubungan antara para pengambil keputusan politik luar negeri dan para aktor dalam negeri yang berupaya mempengaruhi politik luar negeri Amerika Serikat, disebut sebagai "*policy influences system*"

AS adalah sebuah negara yang dihuni oleh bermacam-macam bangsa, salah satunya adalah bangsa yahudi. Orang-orang yahudi telah memperjuangkan

identitas dan kepentingan mereka melalui proses politik sejak 1930an¹¹. Pada tahun itu orang-orang yahudi menjadi sangat kuat secara politik dan mempunyai akses ke berbagai fasilitas sosial termasuk kedalam mempengaruhi politik luar negeri Amerika Serikat.

Pada saat ini orang-orang yahudi telah menduduki jabatan-jabatan penting di dalam kongres Amerika Serikat. Posisi-posisi penting yang sudah dikuasai oleh orang-orang yahudi membuat mereka dapat menggunakan kekuasaan Amerika Serikat untuk kepentingan zionisme mereka. Pengaruh kuatnya loby yahudi dalam pemerintahan Bush J.r ditandai dengan diangkatnya tokoh-tokoh yahudi zionis dalam berbagai posisi di pemerintahan Amerika Serikat.

Keterikatan yang sangat erat di hati para kaum yahudi telah menjadikan suatu solidaritas yang sangat kuat diantara kaum yahudi di dunia, tak terkecuali kaum yahudi yang duduk di kongres Amerika Serikat. Melihat kemenangan Hamas di Palestina, kaum yahudi berpikir bahwa hal tersebut akan menghambat misi zionisme yang diemban mereka, para kaum yahudi yang duduk di kongres berupaya untuk mempengaruhi para "*decision maker*" untuk menolak kepemimpinan hamas.

b. Kemampuan ekonomi dan militer.

Pengambilan keputusan luar negeri suatu negara juga harus mempertimbangkan kekuatan ekonomi dan militer negara tersebut. Negara tersebut harus dapat menyeimbangkan komitmen dan kemampuannya dengan memahami keterbatasan keterbatasan yang dimilikinya.

¹¹ Masiel, Sandy L dan Ira N., *Jewish In American Politics*, Collumbis, Rowman Littlefield, New York, 2000, Hal 30

Letak Palestina yang terletak di kawasan Timur Tengah, mempunyai letak yang sangat strategis. Timur Tengah yang sebagaimana kita tahu adalah sebuah kawasan penghasil minyak bumi terbesar di dunia, hampir 80% persediaan minyak dunia terletak di kawasan Timur Tengah. Amerika sebagai sebuah negara industri, dapat dipastikan mempunyai tingkat konsumsi minyak bumi yang sangat tinggi yang digunakan sebagai bahan bakar dalam proses produksinya. Untuk menjaga persediaan minyaknya, Amerika lantas pada awal 90an mulai menancapkan hegemoninya dengan menginvasi beberapa negara di Timur Tengah. Sedangkan walaupun Palestina bukanlah negara penghasil minyak terbesar di dunia namun letak geografis Palestina di kawasan Timur Tengah sangat penting untuk menjaga hegemoninya di kawasan Timur Tengah. Amerika menggunakan tangan kanannya, yaitu Israel untuk menjaga hegemoni Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah.

Palestina dan Israel adalah dua buah negara yang sejak dulu mengalami pertikaian mengenai masalah wilayah teritorial, dan pertikaian antara Palestina dan Israel telah berlangsung sejak sekitar 50an tahun yang lalu. Israel adalah sebuah negara yang wilayahnya di dapatkan dari usaha israel untuk merebut wilayah dari Palestina, dan pada tahun 1948 Israel berhasil mendapatkan dukungan dari Uni Eropa dan Amerika Serikat untuk melegitimasi berdirinya sebuah negara yahudi di Timur Tengah. Sifat ekspansionis yang dimiliki oleh Israel tidak hanya berhenti di situ saja, akan tetapi tertuang dalam tujuan utama politik luar negeri mereka, bahwa mereka kaum Israel akan selalu berjuang untuk memperluas wilayah teritorial mereka sampai tanpa ada batasan yang jelas. Sifat

ekspansionis Israel tersebut tentu saja akan membutuhkan dukungan senjata yang memadai, dan Israel mendapatkan pasokan senjata yang lebih dari cukup, melalui Amerika Serikat.

Hubungan Amerika Serikat dan Israel selama kegiatan ekspansionis Israel, telah memberikan berbagai bantuan terhadap Israel, termasuk bantuan secara politik, secara diplomatik, dan secara militer melebihi dari segala tradisi hubungan antar negara dalam sejarah sistem internasional¹². Bahkan Amerika telah memberikan bantuan sebesar \$28 miliar dari sejak tahun 1949 – 1984 dibidang militer¹³. Amerika Serikat sebagai salah satu negara penghasil senjata terbesar di dunia, membutuhkan pasar untuk menjual produk produk buaatannya dan sebuah negara untuk melakukan uji coba terhadap senjata barunya.

c. Konteks internasional

Dalam beberapa waktu belakangan setelah berakhirnya Perang Dingin, masalah terorisme telah menjadi ancaman yang semakin mengkhawatirkan bagi kebanyakan orang di negara maju. Serangan terorisme ke Amerika Serikat (AS) pada tanggal 11 September 2001 pada gilirannya telah menandai perkembangan baru gerakan terorisme, yang membawa implikasi terhadap perspektif keamanan global dan kawasan. Peristiwa serangan 11 September telah membawa perubahan besar terhadap politik luar negeri Amerika Serikat. Amerika Serikat sekarang sedang lebih menitik beratkan masalah politik luar negerinya terhadap masalah terorisme, sedangkan masalah HAM, dan demokrasi sudah bukan merupakan prioritas.

¹² Rubenberg, Cherry A, *Israel And American National Interest, A Critical Examination*, University Of Illinois Press, Urbana And Chicago, 1986 hal 330

¹³ Ibid hal 333

Label terorisme sendiri kini telah dibengkokkan oleh Amerika Serikat kepada kelompok-kelompok Islam yang dinilai radikal. Hamas sebagai sebuah organisasi perlawanan rakyat palestina akan tindakan perebuan wilayah oleh Israel yang dalam kegiatannya sering kali menggunakan kekerasan sebagai modus utama. Modus yang digunakan oleh Hamas tersebut di gunakan oleh Amerika Serikat sebagai alasan mengapa Amerika Serikat memasukkan Hamas kedalam golongan organisasi teroris.

F. Hipotesis

Berdasarkan permasalahan yang ada diatas, dan didukung oleh kerangka teori yang diterapkan maka dapat ditetapkan hipotesa sebagai berikut:

Amerika Serikat menolak kemenangan Hamas di Palestina dipengaruhi oleh tiga faktor yaitu:

- a. Adanya tekanan yang sangat kuat dari loby yahudi didalam pemerintahan Amerika Serikat
- b. Adanya kepentingan menjaga persediaan minyak Amerika Serikat dan melindungi Israel sebagai rekan militer.
 1. Kebutuhan minyak Amerika Serikat.
 2. Perlindungan terhadap Israel.
- c. Sebagai salah satu upaya Amerika Serikat dalam memberantas terorisme Internasional.

G. Jangkauan penelitian

Penulisan ini memiliki batasan penelitian terhadap politik luar negeri Amerika Serikat terhadap Palestina dengan rentang waktu periode Januari 2006 hingga Juli 2006.

H. Sistematika penulisan

Bab I Berisi tentang pendahuluan ; alasan pemilihan judul, tujuan penulisan, latar belakang masalah, pokok permasalahan, landasan pemikiran, hipotesa, jangkauan penelitian, metode penulisan, sistematika penulisan, serta teknik pengumpulan data.

Bab II Berisi mengenai penjelasan politik luar negeri Amerika Serikat di Palestina, yaitu tentang karakteristik politik luar negeri Amerika Serikat, dasar-dasar politik luar negeri, tujuan kebijakan luar negeri Amerika Serikat, sarana kebijakan luar negeri Amerika Serikat serta peran serta Amerika Serikat dalam perdamaian Palestina.

Bab III Berisi mengenai dinamika gerakan Hamas, perkembangan Hamas sebagai organisasi perlawanan, serta proses Hamas dalam mengikuti pemilu, serta sikap penolakan Amerika Serikat.

Bab IV Berisi tentang faktor-faktor penolakan Amerika Serikat terhadap kepemimpinan Hamas.

Bab V Berisi tentang kesimpulan.

I. Teknik pengumpulan data

Penelitian ini bersifat studi kepustakaan (*library research*) dan karenanya penelitian ini menggunakan data yang tersedia dari berbagai literature baik buku-buku teks, jurnal ilmiah, berita, artikel dalam majalah dan tabloid, serta dari artikel yang berasal dari internet.